

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya, yaitu sistem pendidikan yang memandang bahwa mutu merupakan salah satu tujuan utamanya. Dikarenakan pendidikan terjadi di lingkungan sekolah, maka peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan utama di sekolah perlu memahami dengan baik bagaimana manajemen supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah, karena supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menguatkan satu sama lainnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin profesional dalam organisasi sekolah bertugas mengatur sumber daya sekolah dan mendayagunakannya dengan melibatkan peran guru-guru, staf, serta pegawai lainnya dalam rangka membimbing dan mendidik peserta didik untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan tujuan pendidikan. Kepala sekolah profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan serta kebutuhan sekolah secara khusus, dengan demikian kepala sekolah akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan sekolah mampu untuk berkembang dan maju, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara lain. Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan di sekolah secara khusus dapat disebabkan oleh kurang baiknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia saat ini akibat dari rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional adalah peningkatan mutu pendidikan melalui mutu sekolah.

Masalah mutu sekolah dalam dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan dirasakan oleh peserta didik, guru, orangtua, masyarakat, dan para stakeholders pendidikan. Terdapat beberapa faktor mutu pendidikan diantaranya perawatan gedung yang baik, guru-guru yang berkualifikasi, nilai moral staf, hasil ujian yang baik, spesialisasi, dukungan orangtua, dukungan dunia usaha, dan dukungan masyarakat setempat, sumber yang memadai, aplikasi teknologi baru, kepemimpinan yang kuat, perhatian penuh pada peserta didik serta kurikulum atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut.

Mutu Pendidikan Nasional akan terukur lewat ketercapaian segenap Standar

Pendidikan Nasional, meliputi standar isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan (PP RI No. 19 tahun 2005 telah disempurnakan dengan PP RI No 32 tahun 2013). Perhatian yang serius dan sungguh-sungguh oleh para pihak terhadap upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar tersebut akan menentukan kualitas/mutu pendidikan.

Persoalan mutu pendidikan merupakan isu yang selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan dan dikaji. Persoalan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan dan perubahan. Suatu perubahan menuntut peran agen pembaharuan (*the agent of change*) dalam memunculkan ide-ide pembaharuan serta mengelola perubahan. Sosok agen perubahan secara internal lembaga pendidikan dimaksud adalah adanya sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, yaitu kepemimpinan yang mampu memenej segenap sumberdaya di lembaga yang dipimpinnya kearah visi dan misi yang diharapkan. Terutama sumberdaya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang disinyalir sarat dengan berbagai persoalan, diantaranya persoalan kualifikasi, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan, serta kinerjanya yang sangat membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalankan segenap tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, selaras dengan tuntutan standar pendidik dan tenaga pendidikan yang dipersyaratkan.

Kepemimpinan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas dan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga mampu membawa unsur-unsur lembaga secara sistemik ke arah yang diinginkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin lembaga pendidikan harus mampu mewujudkan program yang berkelanjutan (*sustainability*) mengacu pada standar mutu yang dipersyaratkan.

Persoalan mutu pendidikan sebetulnya tidak dapat dikaji secara parsial, karena persoalan mutu pendidikan adalah persoalan yang sistemik. Namun pembahasan tentang mutu pendidikan kali ini dibatasi tentang persoalan kepemimpinan kaitannya dengan upaya merealisasikan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pencapaian standar mutu pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan khususnya.

Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan oleh beberapa sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus masalah mutu bisa mencakup kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan (Sallis, 2006). Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar masalah yang berkaitan dengan mutu pendidikan di sekolah salah satunya berasal dari tenaga pendidik dan dapat dikatakan bahwa seorang guru sangat berpengaruh besar dalam tinggi atau rendahnya mutu pendidikan di sekolah.

Sekolah yang memiliki mutu tinggi, tentunya memiliki sumber daya yang berkualitas yaitu sumber daya manusia di sekolah yang profesional. Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan. Untuk menghasilkan guru yang profesional diperlukan adanya

pemberdayaan guru, dalam dunia pendidikan pemberdayaan ditujukan kepada para peserta didik, guru, kepala sekolah dan pegawai administrasi.

Ada tiga permasalahan besar dunia pendidikan di Indonesia, yaitu : (1) masih rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan bagi masyarakat; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; (3) masih lemahnya manajemen pendidikan (Hadis, 2012, hlm. 69). Dari ketiga masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia tersebut, dua masalah yang terakhir, yaitu masalah mutu dan manajemen pendidikan merupakan masalah yang lebih banyak berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Masalah mutu dalam dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan dirasakan oleh para siswa, guru, orangtua, masyarakat, dan para stakeholders pendidikan. Edward Sallis, 1993 (dalam Bafadal, 2003), mengemukakan bahwa :

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sumber mutu pendidikan, yaitu: perawatan gedung yang baik, guru-guru yang berkualifikasi, nilai moral staf yang tinggi, hasil ujian yang baik, spesialisasi, dukungan orang tua, dukungan dunia usaha, dan dukungan masyarakat setempat, sumber yang memadai, aplikasi teknologi baru, kepemimpinan yang kuat, perhatian penuh pada siswa, serta kurikulum yang seimbang atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, peranan layanan kepala sekolah dalam mengendalikan dan menjamin mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Melalui layanan pengajaran dari kepala sekolah, profesionalisme guru dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peran kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena kepala sekolah dan guru secara langsung berinteraksi dengan peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah perlu membimbing, membina serta mengarahkan dengan baik para guru dan stafnya.

Guru sebagai salah satu pelaku pendidikan haruslah seorang yang profesional. Dengan demikian keberadaan guru dalam proses pendidikan dapat bermakna, sehingga masyarakat akan memberikan penghargaan yang lebih baik kepada guru. Guru diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat (Sagala, 2007). Disinyalir bahwa kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan ini adalah terletak pada proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran yang tidak berkembang secara profesional (Suyanto dan Abbas, 2001).

Faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan sejahtera. Oleh karena itu, guru sebagai profesi harus profesional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang diamanatkan kepadanya, dimana guru sebagai salah satu faktor penentu mutu pendidikan.

Guru dalam melaksanakan tugas kesehariannya di kelas merupakan pemain tunggal. Dengan komitmen dan jiwa keprofesionalan yang tinggi dapat membimbing dan menuntun guru untuk bekerja secara profesional sesuai dengan aturan. Namun, di Indonesia sangat sulit untuk terlalu membebaskan guru dalam membelajarkan peserta didik di kelas. Guru tersebut perlu disupervisi oleh kepala sekolah agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka dalam membelajarkan peserta didik di kelas. Melalui supervisi tersebut, juga diharapkan kepala sekolah mengendalikan dan menjamin mutu pembelajaran di kelas.

Dengan adanya peningkatan profesionalisme guru di sekolah merupakan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dalam organisasi sekolah tersebut. Melalui peningkatan profesionalisme guru dalam merencanakan, melaksanakan, menilai proses dan hasil pembelajaran di kelas, dipastikan bahwa mutu

pendidikan akan meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di tingkat institusi, regional, dan nasional.

Profesionalisme guru dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan dan kematangan menuju kemandirian. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar dan menyampaikan materi pelajaran sebagai pertanggungjawaban pembelajaran, melainkan guru harus bertindak sebagai pendidik. Dalam implementasi kedua tugas tersebut diatas Sagala (2006, hlm. 99) menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknik edukatif, tetapi harus memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga, maupun masyarakat.

Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013. Lebih lanjut lagi, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota. Diantara standar pelayanan minimal tersebut salah satunya adalah standar proses. Tujuan ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pemerintah pun sudah mengisyaratkan bagaimana pengelolaan pembelajaran yang efektif, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah bahwa :

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk partisipatif aktif, serta memberikan ruangan yang cukup, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan.

Dari seluruh standar pelayanan minimal, standar proses merupakan muara dari seluruh standar, karena dalam standar proses merupakan perwujudan pelaksanaan dari semua standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya standar proses ini agar terciptanya mutu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Masalah ini berhubungan erat dengan pengawasan profesional untuk memperbaiki pembelajaran, dimana guru belum mendapat bantuan yang optimal sehingga menyebabkan mutu pendidikan menjadi rendah. Realita mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa masalah yang diawali dengan persoalan utama menyangkut mutu pembelajaran.

Kata supervisi di lingkungan pendidikan dipakai dalam membina sekolah dan gurunya, dimana bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Substansi kegiatan supervisi di sekolah berbentuk membina sekolah dan gurunya, berfungsi untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan (Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar 1995, hlm. 1-4).

Salah satu teknik supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu supervisi akademik. Fungsi supervisi akademik merupakan upaya perbaikan sebagai proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Supervisi akademik ini menjunjung tinggi praktek perbaikan mutu secara berkesinambungan (*continous quality improvement*) sebagai salah satu prinsip dasar dan manajemen terpadu ( Hadis, 2010, hlm. 34).

Peranan supervisi kepala sekolah dan profesionalisme guru di sekolah sangat besar, karena supervisi yang dilakukan kepala sekolah secara terus menerus dan kontinu dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Supervisi akademik menjadi dasar atau landasan kegiatan pengawasan profesional, yang menjadi kajian adalah sistem pemberian bantuan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, sehingga guru menjadi lebih mampu dalam menangani tugas pokok membelajarkan peserta didiknya. Berupa perangkat program dan prosedur kegiatan di sekolah yang

ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan guru (Dadang Suhardan, 2010, hlm. 15).

Pelaksanaan supervisi akademik belum mendapat tempat yang layak dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, karena belum digunakan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mempelajari bagaimana pengaruh supervisi yang dijalankan pada proses peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, sebab kepala sekolah adalah orang-orang yang berada di garis depan dalam menentukan keberhasilan mutu pendidikan di sekolahnya.

Dari uraian diatas, terlihat betapa pentingnya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Selain merupakan kewajiban kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi, supervisi kepada guru mencakup pemberian bantuan, baik bantuan teknis yang berupa teknis penyusunan rencana pembelajaran, silabus, dan berbagai perangkat pembelajaran guru, maupun bantuan moral yang berupa dorongan moral agar memiliki semangat kerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian proses pembelajaran yang berkualitas akan dapat tercapai apabila guru tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menciptakan guru yang profesional.

Setelah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, guru secara sadar berupaya untuk belajar memperbaiki kompetensinya menjadi guru yang profesional. Profesionalisme guru merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi, seiring semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memang benar-benar ahli dibidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Pada dasarnya profesionalisme guru merupakan motivasi intrinsik guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesionalisme.

Realita dilapangan menunjukkan masih banyak guru SD Negeri di Kabupaten Purwakarta yang belum menunjukkan kompetensi profesionalismenya secara optimal, selain itu dilihat dari hasil UKG SD di Kabupaten Purwakarta tahun 2015 rata-ratanya juga masih rendah, yaitu berada pada kisaran 55,19. Dimana rata-rata nilai UKG tersebut masih dibawah standar yang diharapkan yaitu 70.

Penguasaan kompetensi profesional guru SD belum sesuai harapan. Hasil UKG yang kurang memuaskan tersebut tidak hanya terjadi pada guru di Kabupaten Purwakarta saja, namun juga berlaku umum secara nasional, dimana nilai rata-rata UKG SD nasional adalah 55,65 dan nilai rata-rata UKG Provinsi Jawa Barat 2015 sekitar 55,06 (nilai rata-rata terendah dibandingkan 6 Provinsi lain di Indonesia).

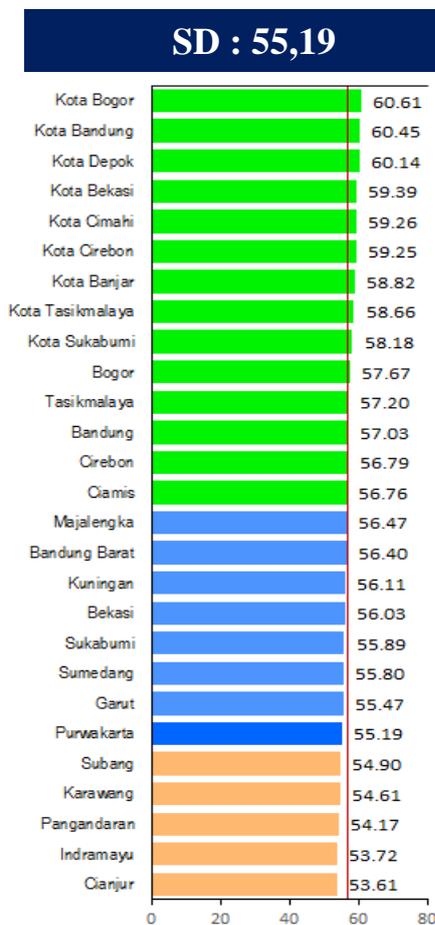
Rendahnya mutu guru di Indonesia menjadi sorotan publik. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa guru Sekolah Dasar di Indonesia hanya berhasil mendapatkan nilai yang masih yaitu nilai di bawah rata-rata nasional. Bahkan, tidak ada seorang pun guru yang berhasil meraih nilai maksimal 100. Nilai tertinggi UKG pada tahun 2015 hanya mencapai 91,12.

Kondisi diatas ternyata berpengaruh buruk terhadap mutu pendidikan nasional. Survei dari World Bank yang melibatkan sedikitnya 12 negara di Asia menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia berada pada posisi terendah se-Asia. Riset lainnya yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu kemampuan peserta didik Indonesia dalam bidang Matematika dan Sains cenderung terpuruk.

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya nilai UKG yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu, diantaranya usia guru dan masih minimnya pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi modern seperti komputer, laptop, dan lainnya. Selain itu masih banyak guru yang berstatus sebagai tenaga honorer. Sehingga diperlukan pembinaan dan bimbingan khusus untuk meningkatkan potensinya dalam mendidik peserta didik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa hasil nilai uji kompetensi guru masih jauh dari standar. Dari penilaian pada tiga hari

pelaksanaan UKG, nilai rata-rata UKG SD masih di bawah standar yang ditentukan yaitu sebesar 70. Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Gambar 1.1**

### **Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru Kab. Purwakarta**

**Sumber data : Disdikpora Kab. Purwakarta**

Faktor yang mempengaruhi masih rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta, salah satunya adalah nilai akreditasi sekolah. Sekolah mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan mutu pendidikan di sekolahnya. Capaian nilai akreditasi yang belum sesuai harapan dapat menjadi cermin bahwa mutu pendidikan SD Negeri di Kabupaten Purwakarta masih rendah dan perlu ditingkatkan. Masih rendahnya mutu pendidikan dilihat dari nilai akreditasi sekolah dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan supervisi yang kurang intensif oleh Kepala Sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, salah satu dimensi kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah kompetensi supervisi, dimana perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Nilai akreditasi SD Negeri Kab. Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Sekolah dan Nilai Akreditasi SD Kab.Purwakarta**

No	Kecamatan	AKREDITASI				
		A	B	C	Belum	Tidak
1.	Kec. Babakancikao	5	11	0	4	0
2.	Kec. Bojong	1	15	6	0	0
3.	Kec. Bungursari	5	13	0	0	0
4.	Kec. Campaka	2	15	1	2	0
5.	Kec. Cibatu	2	9	1	2	0
6.	Kec. Darangdan	3	28	3	1	0
7.	Kec. Jatiluhur	3	26	2	1	0
8.	Kec. Kiarapedes	2	14	1	0	0
9.	Kec. Maniis	2	10	4	0	0
10.	Kec. Pasawahan	6	12	2	2	0
11.	Kec. Plered	10	15	0	2	0
12.	Kec. Pondok Salam	1	12	2	1	0
13.	Kec. Purwakarta	12	34	2	7	0
14.	Kec. Sukasari	0	10	0	0	0
15.	Kec. Sukatani	0	22	9	0	0
16.	Kec. Tegalwaru	2	21	2	0	0
17.	Kec. Wanayasa	3	17	0	1	0

**Sumber data : Disdikpora Kab. Purwakarta**

Permasalahan saat ini yang menyangkut supervisi antara lain kurang intensifnya pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik di atas, berdasarkan temuan di lapangan, melalui wawancara pada tanggal 23 Oktober 2016 yang dilakukan peneliti dengan beberapa guru SD Negeri di Kabupaten Purwakarta, bahwa supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah belum dilaksanakan secara optimal dan laporan supervisi hasil rekayasa sehingga guru yang disupervisi tidak tahu harus melakukan perbaikan seperti apa dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Seperti yang terjadi pada beberapa SD Negeri di Kabupaten Purwakarta, bahwa sistem pelaksanaan supervisi belum berjalan secara efektif terutama berkaitan dengan upaya pembinaan profesional guru-guru. Pelaksanaan supervisi baru terbatas pada perhatian segi fisik dan administrasi formal serta kurang memperhatikan pada pengawasan pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM).

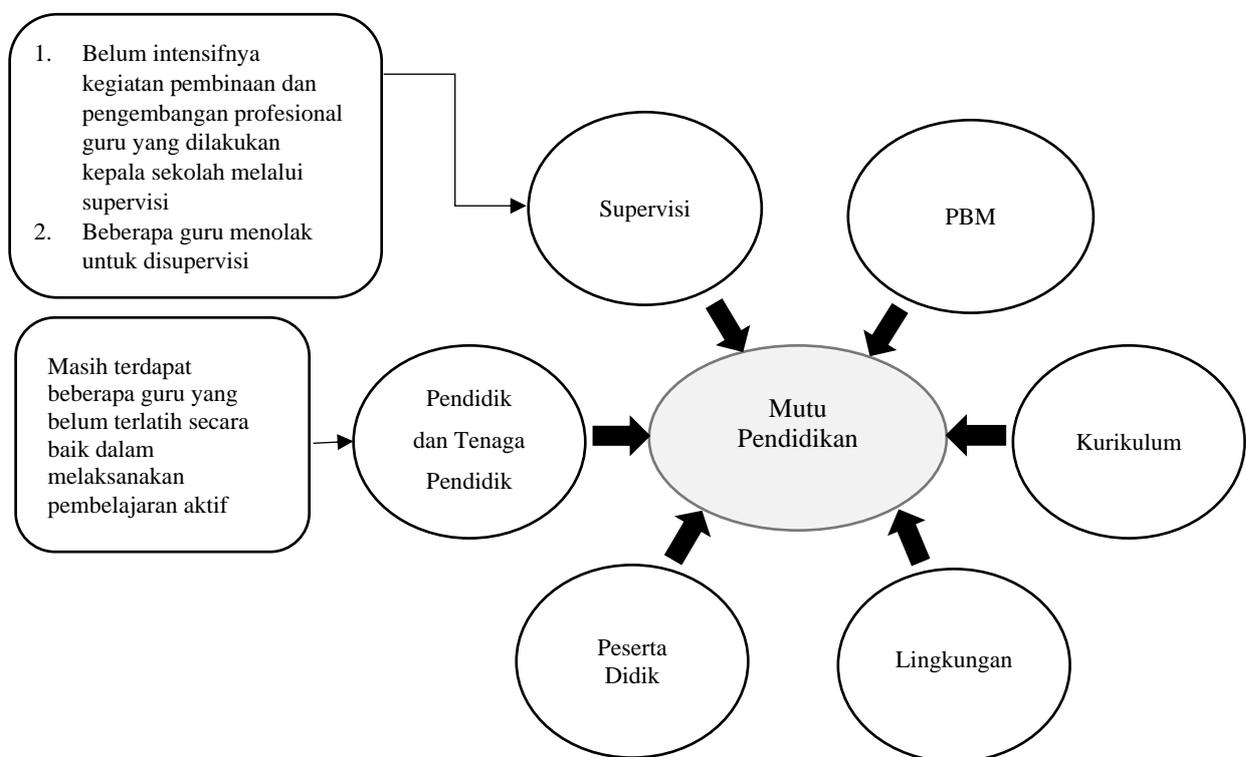
Begitupun wawancara informal peneliti dengan beberapa kepala SD Negeri di Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa kepala SD Negeri yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan melakukan supervisi akademik rata-rata hanya 1 kali setiap semester. Data tersebut memang bukan data keseluruhan kepala sekolah di Kabupaten Purwakarta, namun setidaknya dapat menjadi cermin bahwa frekuensi supervisi akademik masih rendah, karena idealnya supervisi akademik dilakukan 1 kali tiap semester untuk tiap kelas. Jadi, apabila dalam satu sekolah terdapat 6 kelas, maka idealnya supervisi akademik dilakukan 6 kali tiap semester.

Kurang intensifnya pelaksanaan supervisi akademik disebabkan banyaknya tugas administratif kepala sekolah sehingga sulit meluangkan waktu untuk melakukan supervisi akademik secara intensif. Kondisi demikian jika terus berlanjut akan memberikan iklim yang kurang kondusif terhadap peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan. Begitu pentingnya peran dan fungsi guru bagi dunia pendidikan, maka kepala sekolah mempunyai peran sentral dalam mengelola personalia khususnya terhadap kompetensi profesional guru di sekolah, sehingga sangat penting kepala sekolah untuk memahami dan menerapkan kompetensi supervisi akademik dengan baik.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, untuk menganalisis pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Purwakarta”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa variabel yang akan diteliti. Mutu pembelajaran sebagai subsistem dari mutu pendidikan mempunyai permasalahan yang kompleks, mengingat kualitas belajar siswa merupakan muara dari seluruh komponen yang tergabung dalam sistem pembelajaran di sekolah. Akan tetapi faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan tidak hanya berasal dari satu faktor saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, antara lain : Pendidik dan tenaga pendidik, peserta didik, supervisi, PBM, Kurikulum, dan lingkungan.



**Gambar 1.2**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan**

**Sumber : UNESCO dalam buku EFA Global Monitoring Report  
(2005, hal. 66)**

Dari semua faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yang menjadi faktor sentral yaitu kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi seorang guru sehingga dapat membantu guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan guru merupakan faktor yang sangat

penting dalam proses pembelajaran di kelas serta unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Upaya dalam mengantisipasi peranan guru yang semakin luas, guru harus memiliki kemampuan profesional dalam menciptakan mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kemampuan profesional seperti yang dinyatakan dalam Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bertolak dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Seberapa Besar Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Purwakarta”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana supervisi akademik kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?
4. Seberapa besar pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?
5. Seberapa besar pengaruh profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?
6. Seberapa besar pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, menganalisa data, menemukan model hasil analisis serta menguji kebermaknaan

pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Purwakarta.

#### 1. Tujuan Umum

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta data empirik terkait supervisi akademik kepala sekolah, profesionalisme guru, dan mutu pendidikan SD Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- b. Melakukan analisis dan diverifikasi terkait pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan SD Negeri di Kabupaten Purwakarta.

#### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui supervisi akademik kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- b. Mengetahui profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- c. Mengetahui mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- d. Mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- e. Mengetahui pengaruh profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.
- f. Mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pendidikan melalui profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purwakarta.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni, khususnya dalam administrasi pendidikan dan mutu pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan profesionalisme guru.
- b. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah.

### 1.6 Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini terdiri atas lima Bab, tersusun sebagai berikut :

**Bab I.** Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya berisi uraian latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur tesis.

**Bab II.** Berisi tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Isi dari Bab ini adalah konsep-konsep/ teori-teori/ model-model bidang utama dan turunannya yang dikaji, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian.

**Bab III.** Berisi tentang metodologi penelitian, penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang mencakup komponen-komponen lokasi dan suyek populasi/ sampel penelitian, cara memilih sampel serta justifikasi dari pemilihan lokasi serta penggunaan sampel, desain dan metode penelitian, definisi operasional dari tiap variabel disertai indikatornya, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**Bab IV.** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan

masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian, serta berisi pembahasan atau analisis temuan.

**Bab V.** Berisi tentang kesimpulan dan saran, berisi tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta saran atau rekomendasi yang dapat ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian dalam kajian yang sama.

